

PROPOSAL UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1. LATAR BELAKANG

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dan diperoleh dengan cepat dan tepat oleh setiap pengguna Informasi publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rumah sakit merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik harus senantiasa menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala,serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Mengingat pentingnya informasi publik, terutama informasi yang dikecualikan maka sangat diperlukan Uji konsekuensi untuk melindungi dari kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dan mendapatkan Daftar Informasi Publik pada RSJD Surakarta yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik

3. TUJUAN

- **Tujuan Umum**

Tujuan Umum untuk mendapatkan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- **Tujuan Khusus**

Setelah melaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik diharapkan :

1. Memahami Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengetahui Daftar Informasi Publik secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan yang dimiliki RSJD Surakarta.
3. Menerapkan Daftar Informasi Publik secara berkala,serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan ke Website PPID RSJD Surakarta.
4. Mengantisipasi apabila ada sengketa informasi.

4. MATERI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Daftar Informasi Publik Tahun 2018.
3. Rancangan Daftar Informasi Publik Tahun 2019.
4. Naskah Pertimbangan Informasi Publik yang dikecualikan.

5. WAKTU DAN TEMPAT

Pelatihan akan dilaksanakan pada :

Tanggal : Senin, 11 Februari 2019.
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Marakata RSJD Surakarta

6. PESERTA

Peserta pelatihan sebanyak 29 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 20 orang
2. Tim PPID : 9 orang

7. NARASUMBER

1. Nama : Ir. Arief Boedijanto, M.Si
NIP : 19630403 199311 1 002
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
2. Nama : Slamet Haryanto, SH, MH
Pangkat/Gol : Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

2. Nama : Slamet Haryanto, SH, MH
Pangkat/Gol : Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

8. RENCANA BIAYA

- 1) Honor Narasumber : 2 orang
- 2) Transport Narasumber : 2 orang
- 3) Konsumsi Narasumber : 2 orang
- 4) Snack : 1 hari x 1 x 29 = 29
- 5) Makan Siang : 1 hari x 1 x 29 = 29
- 6) Penggandaan :
 - Kertas HVS : 1 rim
 - Materi : 29 peserta

9. SUMBER PENDANAAN

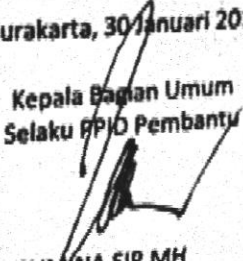
Biaya Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik tahun 2019 menggunakan dana BLUD Tahun 2019, dengan mata anggaran biaya jasa konsultan : Uji konsekuensi (B.4.10.3.).

10. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dan persetujuan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan harapan semua dapat memahami Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendapatkan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengetahui
Gubernur Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah

Dr. AGUSTIN CHRISTIAWATI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610810 198711 2 001

Surakarta, 30 Januari 2019
Kepala Bagian Umum
Selaku PPID Pembantu

SUMINA, S.I.P., M.H.
Pembina
NIP. 19631212 198302 1 002

Lampiran-lampiran :

• **Kepanitiaan**

1. Penanggungjawab : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
2. Pengarah : 1. Wakil Direktur Administrasi
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis
3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu : Sumina, SIP, MH
4. Pelaksana Teknis / Administrasi :
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Umum
 - Wakil Ketua : Kepala Instalasi Humas dan Pemasaran
 - Sekretaris : Ania Widya Pratiwi, Amd
 - Anggota : 1. Desi ratih Kusumaningtyas, S.Kom
2. Rika Pambudi, Amd
3. Diahwarih Anindya P, Amd
4. Lidya Chrityana Adi, Amd
5. Dheka Maras Nata P, Amd

- **Jadwal Uji Konsekuensi Daftar Pelayanan Publik tahun 2019**

Senin, 11 Februari 2019

Waktu	Susunan Acara	Keterangan
08.00 - 08.15 WIB	Pembukaan dan Sambutan	Panitia
08.15 - 13.15 WIB	Evaluasi Tata Kelola Keterbukaan Pelayanan Publik, SAQ, Website, DIP 2018 Penyusunan DIP, Kesesuaian DIP & Uji Konsekuensi	Slamet Haryanto, SH, MH Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
13.15 - 13.30 WIB	ISTIRAHAT	ISHOMA
13.30 - 15.30 WIB	Keterbukaan Publik dan Open Data	Ir. Arief Boedijanto, M.Si Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
15.30 – 16.00 WIB	Tanya Jawab dan Penutup	Panitia

• Curriculum Vitae Narasumber

CV Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si

IDENTITAS

Nama : Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si
NIP : 196304031993111002
FP ID : 000100387
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

PANGKAT/GOLONGAN TERAKHIR

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
TMT Pangkat/Golongan : 01-04-2011

JABATAN TERAKHIR

Nama Jabatan : KABID STATISTIK
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TMT Jabatan : 05-11-2018
Eselon : 31
Masa Kerja : 17 TAHUN 05 BULAN

PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR

Tingkat : STRATA 2 (S2)
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Tahun Lulus : 2003

DIKLAT STRUKTURAL TERAKHIR

Nama Diklat : SEPADA/ADUM
Tanggal : 01-01-1997

Curriculum Vitae

SLAMET HARYANTO, SH., MH

Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 27 Desember 1979
 Jenis Kelamin : Pria
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 Tinggi / Berat : 163 cm / 68 kg

1. PENDIDIKAN

2013 - 2017 **Magister Hukum (S2) Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Semarang**
 1999 - 2006 Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
 1996 - 1999 SMU Sunan Kalijogo Semarang-Indonesia
 1993 - 1996 SMP Taman Dewasa/Siswa Semarang-Indonesia
 1990 - 1993 SD Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Semarang- Indonesia

2. PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

2009 Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PERADI dan Universitas Diponegoro (UNDIP)
 2009 Pelatihan Reformasi Sistem Keamanan (RSK), IMPARSIAL
 2009 Training Of Trainer HAM untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, OSLO Coalition, TIFA Foundation serta YLBHI
 2008 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi Internasional (TI) dan PATTIRO Semarang
 2008 Training Pemantauan dan Investigasi Perilaku Hakim, Komisi Yudisial RI
 2006 Training Of Trainer Politik Anggaran, IDEA Jogja
 2006 Training Of Trainer Pelatihan Staf Crisis Center Penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan by Bappeda Propinsi Jawa Tengah-UNICEF
 2006 Pelatihan HAM Berperspektif Gender facilitated by Komnas Perempuan
 2006 Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PERADI dan YLBHI
 2005 Pelatihan Bantuan Hukum Struktural, TIFA Foundation dan LBH Palembang
 2004 Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), LBH Semarang

3. PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI

2018 - 2022 **Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**
 2014 - 2018 Asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 2013 - 2017 Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan HAM DPC PERADI Semarang
 2013 - 2017 Direktur Pusat Bantuan Hukum DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) SMG
 2011 - 2013 Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - LBH Semarang
 2010 - sekrng Anggota Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) UNISSULA

- 2010 Fasilitator pendidikan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, kerjasama YLBHI, OSLO Coalition dan TIFA
- 2009 Traker Calon Hakim Adhoc Tipikor, kerjasama MAPPI UI
- 2009 - Skrng Traker Calon Hakim Agung, kerjasama Komisi Yudisial RI dengan LBH Semarang
- 2009 - 2012 Anggota Tim Independen Kajian Penyesuaian Tarif PDAM Kota Semarang
- 2009 - 2011 Kepala Operasional YLBHI-LBH Semarang
- 2008 - 2009 Kepala Divisi Perburuhan dan Masyarakat Miskin Perkotaan YLBHI-LBH Semarang
- 2008 - Skrng Traker Kinerja Hakim Karier di lingkungan Pengadilan Negeri, kerjasama Komisi Yudisial RI dan LBH Semarang
- 2008 Pemantau Lembaga Pemasarakatan (LP) dalam rangka Reformasi Standar pelayanan LP di Jawa Tengah, kerjasama Kemitraan (Partnerships dan MAPPI UI)
- 2008 Fasilitator pendidikan HAM bagi anggota RAN-HAM Jateng, kerjasama Departemen Hukum dan HAM Jateng (sekarang Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)
- 2008 Traker Calon Anggota Komisi Informasi Republik Indonesia, kerjasama TIFA Foundation
- 2007 - 2009 Dosen Tetap Fakultas Hukum UNISBANK
- 2007 - Skrng Anggota Pokja Implementasi Norma dan Standar HAM RAN HAM Jawa Tengah - Kementerian Hukum dan HAM Jateng
- 2007 Anggota Aliansi Masyarakat Anti Mafia Peradilan Jawa Tengah (AMPERA)
- 2007 Fasilitator Pendidikan Anti Mafia Peradilan se- Jawa Tengah kerjasama antara Kemitraan (Partnerships) dengan LBH Semarang
- 2006 - 2007 Fasilitator untuk pendidikan hukum dan HAM bagi 177 lurah se-Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang
- 2006 - 2007 Fasilitator untuk pendidikan hukum dan HAM bagi 16 Sekretaris Camat se-Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang
- 2006 Fasilitator Training Politik Anggaran bagi Masyarakat Korban Gempa Jogjakarta kerjasama IDEA JOGJA dan Lembaga Advokasi Anggaran (LADANG)
- 2006 Fasilitator Training Politik Anggaran bagi Pedagang Kali Lima (PKL) se-Kota Semarang kerjasama IDEA JOGJA, Lembaga Advokasi Anggaran (LADANG) dan LBH Semarang
- 2006 Koordinator Komisi Daerah Pemberantasan Korupsi Semarang (KOMDA - PK) _Koalisi LSM Se-Semarang_
- 2006 Sekjend Gerakan Penyelamat Uang Rakyat Jawa Tengah _Koalisi LSM Anti Korupsi Se-Jateng_
- 2006 Relawan LSM Central Java Police Watch (CJPW) Jawa Tengah
- 2004 Ketua Lembaga Kajian Mahasiswa Unissula Semarang
- 2001 - 2003 Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Semarang
- 2000 - 2001 Koord. Divisi Advokasi Mahasiswa Pencinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA

4. REFERENCE

- H. AMIR DARMANTO, SH
Anggota Komisi A DPRD PROPINSI JAWA TENGAH
Mobile : 08122906229
- Hj. SRI HARTINI, ST
Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah
- BONA VENTURA SULISTİYANA, SH., MH
- RAHMULYO ADI WIBOWO, SH., MH
Ketua Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah
Mobile : 0813 2834 9754
- H. Dr. MAHFUDZ ALI, SH, MSi.
Mantan Wakil Walikota Semarang
Dewan Penasehat KP2KKN Jawa Tengah
Mobile : 081 2290 4341
- Setyowati, SH., MH
Kabid HAM Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Mobile : +62 081 2284 7504
- Alvon Kurnia Palma, SH., MH
Mantan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jl. Diponegoro no. 74 Jakarta Pusat
Mobile : 081 2670 7217
- Helen Intania Surayda
Assistance Finance Officer DBE3 USAID Jateng
Jl. Indrapura no. 10 Semarang
Mobile : 0813 2570 6316